KOMUNIKASI PERSUASIF SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PROSTITUSI DI KOTA GORONTALO

Mochammad Dafa Anwar Syarief
NPP. 33.0994
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: mochammaddafaanwarsyarief@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Arwanto Harimas Ginting, S.STP., M.Si
Email: arwantoharimasginting@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Research Gap: *This study focuses on the need for a humane and persuasive enforcement approach by the Civil Service Police Unit in controlling prostitution in Gorontalo City. Prostitution remains a public order issue and is increasingly difficult to control because it appears in both conventional and digital forms. Previous studies on persuasive communication by the Civil Service Police Unit mostly discuss street vendors, illegal buildings, or night stalls, while research on prostitution control is still limited.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze persuasive communication used by the Civil Service Police Unit in controlling prostitution in Gorontalo City.* ***Method:*** *This study uses a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation. Informants consisted of officials and members of the Civil Service Police Unit, Social Affairs Office personnel, local community members, and prostitution offenders selected using purposive and snowball sampling. Data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing.* ***Result:*** *The findings show that persuasive communication has been implemented through strengthening arguments, psychological appeal, and credibility appeal. Officers conveyed legal bases, field facts, and social impacts in simple language; used humane, calm, and ethical approaches; and built credibility through rhetoric, emotional control, integrity, and non-discriminatory treatment. Nevertheless, implementation still faces psychological barriers, including resistance and negative perceptions toward officers, as well as semantic barriers caused by differences in language comprehension and overly formal terms.* ***Conclusion:*** *Persuasive communication supports prostitution control in Gorontalo City by creating a more conducive, educative, and humane enforcement process. Improvement is needed through communication training, stronger female officer involvement, cross-sector collaboration, and social empowerment programs for offenders.*

Keywords: *Civil Service Police Unit; Gorontalo City; Persuasive Communication; Prostitution Control; Public Order.*

ABSTRAK

Permasalahan/Kesenjangan Penelitian: Penelitian ini berfokus pada pentingnya pendekatan penertiban yang humanis dan persuasif oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban prostitusi di Kota Gorontalo. Prostitusi masih menjadi persoalan ketenteraman dan ketertiban umum, serta semakin sulit dikendalikan karena berkembang dalam bentuk konvensional maupun berbasis digital. Penelitian terdahulu mengenai komunikasi persuasif Satpol PP lebih banyak membahas penertiban pedagang kaki lima, bangunan liar, dan warung malam, sedangkan kajian mengenai penertiban prostitusi masih terbatas. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi persuasif Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban prostitusi di Kota Gorontalo. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri atas unsur Satpol PP Kota Gorontalo, Dinas Sosial, masyarakat sekitar, serta pelaku prostitusi yang dipilih melalui teknik purposive dan snowball sampling. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi persuasif dilaksanakan melalui dimensi memperkuat argumen, daya tarik psikologis, dan daya tarik kredibilitas. Petugas menyampaikan dasar hukum, data lapangan, dan dampak sosial dengan bahasa yang mudah dipahami; menggunakan pendekatan yang tenang, santun, dan memperhatikan norma masyarakat; serta membangun kredibilitas melalui kemampuan retorika, pengendalian emosi, integritas, dan perlakuan yang tidak diskriminatif. Kendala utama yang ditemukan adalah hambatan psikologis berupa penolakan pelaku dan citra negatif terhadap Satpol PP, serta hambatan semantis akibat perbedaan pemahaman bahasa dan penggunaan istilah formal. **Kesimpulan:** Komunikasi persuasif berperan penting dalam mendukung penertiban prostitusi di Kota Gorontalo karena mampu menciptakan proses penertiban yang lebih kondusif, edukatif, dan humanis.

Kata kunci: Gorontalo; Ketertiban Umum; Komunikasi Persuasif; Penertiban Prostitusi; Satpol PP.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Dalam konteks pemerintahan daerah, tugas menjaga ketenteraman dan ketertiban umum tidak hanya dipahami sebagai tindakan penegakan aturan, tetapi juga sebagai upaya menciptakan kehidupan sosial yang tertib, aman, dan sesuai dengan norma yang berlaku. Satuan Polisi Pamong Praja menjadi perangkat daerah yang memiliki mandat untuk menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Salah satu persoalan ketertiban umum yang masih dihadapi Kota Gorontalo adalah praktik prostitusi. Berdasarkan data Satpol PP Kota Gorontalo sepanjang tahun 2025 tercatat 100 kasus penangkapan pasangan di luar nikah di ruang tertutup, dengan pelanggar lokal lebih dominan dibandingkan pelaku pendatang. Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan ketertiban umum di Kota Gorontalo tidak hanya bersumber dari pendatang, tetapi juga berkaitan dengan perilaku sebagian masyarakat lokal yang perlu dibina melalui pendekatan yang tepat.

Dalam perkembangan terbaru, praktik prostitusi tidak hanya berlangsung secara konvensional di penginapan, tempat hiburan, atau lokasi tertentu, tetapi juga mulai memanfaatkan media sosial dan aplikasi komunikasi digital. Perubahan pola tersebut membuat proses pengawasan dan penertiban menjadi lebih sulit karena transaksi dapat dilakukan secara tertutup dan berpindah-pindah. Dengan demikian, Satpol PP perlu menyesuaikan pola penertiban agar tidak hanya bertumpu pada operasi lapangan, tetapi juga memperkuat komunikasi dan kerja sama masyarakat.

Kondisi Kota Gorontalo yang dikenal menjunjung nilai adat dan religiusitas melalui falsafah "Adat Bersendikan Syara', Syara' Bersendikan Kitabullah" membuat prostitusi menjadi persoalan yang sensitif. Fenomena tersebut tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran ketertiban umum, tetapi juga sebagai gangguan terhadap nilai sosial dan moral masyarakat. Karena itu, penertiban prostitusi memerlukan pendekatan yang tidak semata-mata represif, melainkan juga edukatif, persuasif, dan memperhatikan kondisi sosial masyarakat.

Komunikasi menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan tugas Satpol PP. Penertiban yang dilakukan tanpa komunikasi yang baik berisiko menimbulkan penolakan, konflik, dan citra negatif terhadap aparat. Sebaliknya, komunikasi yang tepat dapat membantu petugas menyampaikan dasar hukum, menjelaskan dampak pelanggaran, membangun kesadaran, dan mendorong kepatuhan masyarakat secara lebih sukarela.

Komunikasi persuasif dalam penelitian ini dipahami sebagai proses menyampaikan pesan untuk memengaruhi sikap dan perilaku orang lain tanpa mengandalkan paksaan langsung. Dalam konteks Satpol PP, komunikasi persuasif diperlukan agar pelaku dan masyarakat memahami alasan penertiban, menerima pesan yang disampaikan, dan bersedia mengikuti pembinaan maupun ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan ini penting karena pelaku prostitusi kerap memiliki latar belakang ekonomi, sosial, dan psikologis yang beragam.

Penelitian ini menggunakan teori komunikasi persuasif DeVito yang memuat tiga alat utama, yaitu memperkuat argumen, daya tarik psikologis, dan daya tarik kredibilitas. Ketiga dimensi tersebut sesuai untuk menilai bagaimana Satpol PP Kota Gorontalo menyampaikan pesan berbasis data dan dasar hukum, membangun pendekatan yang sesuai dengan kondisi psikologis dan norma masyarakat, serta menunjukkan kredibilitas melalui kemampuan retorika dan integritas.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penelitian terdahulu mengenai komunikasi persuasif Satpol PP lebih banyak diarahkan pada penertiban pedagang kaki lima, bangunan liar, warung malam, dan pedagang liar. Kajian tersebut menunjukkan bahwa komunikasi persuasif penting untuk mengurangi resistensi dan memperkuat kepatuhan masyarakat. Namun, konteks prostitusi memiliki karakteristik yang berbeda karena berkaitan dengan stigma sosial, persoalan moral, faktor ekonomi, kerentanan sosial, dan kemungkinan keterlibatan jaringan digital.

Kesenjangan penelitian terletak pada masih terbatasnya kajian yang secara khusus membahas komunikasi persuasif Satpol PP dalam penertiban prostitusi. Padahal, prostitusi merupakan bentuk penyakit masyarakat yang membutuhkan penanganan lintas sektor dan pendekatan yang lebih hati-hati. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana Satpol PP Kota Gorontalo menerapkan komunikasi persuasif dalam penertiban prostitusi serta hambatan yang muncul dalam proses komunikasi di lapangan.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena penertiban prostitusi tidak dapat hanya bergantung pada operasi lapangan dan sanksi administratif. Apabila komunikasi persuasif tidak berjalan efektif, maka pelaku dapat kembali melakukan aktivitas yang sama, masyarakat enggan memberikan informasi, dan citra Satpol PP sebagai aparat penertiban dapat semakin negatif. Kondisi tersebut berpotensi menghambat tujuan pemerintah daerah dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum.

Dari sisi praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi Satpol PP Kota Gorontalo dalam memperbaiki strategi komunikasi saat melakukan penertiban. Dari sisi akademik, penelitian ini memperkaya kajian komunikasi persuasif dalam konteks pemerintahan daerah, khususnya pada fungsi ketenteraman dan ketertiban umum. Dari sisi kebijakan, hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk memperkuat pelatihan komunikasi, penyusunan standar operasional berbasis pendekatan humanis, dan peningkatan koordinasi dengan Dinas Sosial serta unsur masyarakat.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian yang membahas komunikasi persuasif, penertiban oleh Satpol PP, pengendalian sosial, serta penanganan prostitusi.

Tabel 1.
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Peneliti/Tahun	Fokus Penelitian	Relevansi
1	Salsabila (2025)	Komunikasi persuasif Satpol PP dalam penertiban warung malam.	Memberi gambaran bahwa pendekatan humanis diperlukan dalam mengurangi resistensi penertiban.
2	Wibisono (2025)	Komunikasi persuasif Satpol PP dalam penertiban bangunan liar.	Menunjukkan pentingnya kejelasan informasi hukum dan komunikasi langsung dengan warga.
3	Saputra (2024)	Komunikasi persuasif Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima.	Menegaskan perlunya pelatihan komunikasi bagi petugas lapangan.
4	Cahya (2022)	Strategi komunikasi persuasif Satpol PP dalam penertiban PKL di Semarang.	Menunjukkan bahwa strategi komunikasi harus disesuaikan dengan karakteristik sasaran penertiban.
5	Hamka dan Arsyad (2023)	Pola komunikasi persuasif Satpol PP dalam penertiban pedagang liar.	Relevan dalam melihat unsur persuader, pesan, saluran, umpan balik, dan efek komunikasi.
6	Rahayu dan Erianjoni (2021)	Strategi pengendalian sosial pekerja seks komersial oleh Satpol PP.	Memberi konteks pengendalian sosial dan pembinaan terhadap pelaku prostitusi.
7	Rizal, Herawati, dan Kismartini (2024)	Collaborative governance dalam penanggulangan prostitusi.	Relevan untuk melihat perlunya kolaborasi lintas aktor dalam penanganan prostitusi.

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026.

Secara teoretis, komunikasi persuasif dalam penertiban tidak dapat dilepaskan dari konsep perubahan sikap, pengolahan pesan, kredibilitas sumber, serta kepatuhan terhadap otoritas. Ajzen (1991) menekankan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Kerangka tersebut relevan untuk membaca mengapa pelaku penertiban tidak cukup hanya diberi ancaman sanksi, tetapi juga perlu diyakinkan melalui alasan yang masuk akal, norma sosial, dan alternatif perilaku yang lebih dapat diterima. Petty dan Cacioppo (1986) melalui elaboration likelihood model menjelaskan bahwa pesan persuasif dapat bekerja melalui jalur sentral ketika komunikan menimbang argumen secara serius, atau melalui jalur periferal

ketika komunikan dipengaruhi oleh kredibilitas dan daya tarik komunikator. Dalam konteks Satpol PP, dua jalur tersebut terlihat dari penggunaan dasar hukum, data lapangan, sikap sopan, dan kredibilitas petugas.

Kajian psikologi sosial juga menunjukkan bahwa pengaruh sosial tidak hanya lahir dari tekanan formal, tetapi juga dari kepercayaan, konsistensi pesan, dan norma bersama. Cialdini dan Goldstein (2004) menjelaskan bahwa kepatuhan, konformitas, dan penerimaan pesan sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan sosial antara pemberi pesan dan penerima pesan. Chaiken (1980) menambahkan bahwa penerima pesan dapat menggunakan pemrosesan heuristik ketika mereka menilai pesan melalui isyarat sederhana seperti kepercayaan kepada sumber, sementara Dillard dan Shen (2005) menunjukkan bahwa pesan persuasif dapat menimbulkan reactance apabila komunikan merasa dipaksa atau direndahkan. Temuan ini memperkuat pentingnya pendekatan Satpol PP yang tidak menghakimi, tidak kasar, serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

Dalam kajian kepatuhan hukum dan legitimasi aparat, Tyler (2006), Sunshine dan Tyler (2003), Jackson et al. (2012), Mazerolle et al. (2013), serta Murphy et al. (2009) menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat lebih kuat ketika otoritas dipandang sah, adil, netral, dan menghormati warga. Artinya, efektivitas penertiban tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal Satpol PP, tetapi juga oleh persepsi masyarakat terhadap cara petugas memperlakukan mereka. Apabila petugas menjelaskan prosedur, memberi kesempatan berbicara, menggunakan bahasa yang santun, dan menunjukkan sikap tidak diskriminatif, maka peluang diterimanya pesan penertiban akan lebih besar.

Literatur internasional tentang prostitusi dan kebijakan publik menekankan pentingnya penanganan yang berbasis bukti, hak sosial, dan pencegahan dampak kesehatan serta ketertiban. Weitzer (2009) menunjukkan bahwa kajian prostitusi harus menghindari generalisasi berlebihan dan perlu memperhatikan keragaman konteks sosial. Shannon et al. (2015), Decker et al. (2015), Platt et al. (2018), dan Rekart (2005) menegaskan bahwa pendekatan hukum terhadap prostitusi berhubungan dengan kesehatan, keamanan, stigma, dan akses kepada layanan sosial. Dalam konteks Kota Gorontalo, temuan tersebut menguatkan argumentasi bahwa penertiban perlu disertai pembinaan, rujukan kepada Dinas Sosial, pemberdayaan ekonomi, dan komunikasi yang tidak mempermalukan pelaku.

Karya dosen dan civitas akademika IPDN juga memberikan dasar yang relevan bagi penelitian ini. Eviany dan Sutiyo (2023) menegaskan pentingnya perlindungan masyarakat sebagai bagian dari penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Simangunsong (2017) memberikan dasar metodologis penelitian pemerintahan yang menekankan pentingnya kesesuaian antara masalah pemerintahan, informan, dan lokus penelitian. Labolo (2006) menjelaskan fungsi pemerintahan dalam pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Selain itu, penelitian Salsabila (2025), Saputra (2024), Cahya (2022), dan Wibisono (2025) menunjukkan bahwa komunikasi persuasif Satpol PP dalam berbagai objek penertiban masih menghadapi tantangan resistensi sosial, persepsi negatif terhadap aparat, dan kebutuhan peningkatan kapasitas komunikasi petugas.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara khusus membahas komunikasi persuasif Satpol PP dalam penertiban prostitusi di Kota Gorontalo. Penelitian terdahulu tentang Satpol PP umumnya membahas objek penertiban yang bersifat ekonomi atau tata ruang, sedangkan penelitian ini mengkaji objek penertiban yang sensitif secara sosial, moral, dan psikologis.

Kebaruan lainnya terdapat pada penggunaan teori komunikasi persuasif DeVito untuk membaca praktik penertiban prostitusi melalui tiga dimensi utama, yaitu memperkuat argumen, daya tarik psikologis, dan daya tarik kredibilitas. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya menggambarkan tindakan penertiban, tetapi juga menilai kualitas komunikasi yang digunakan petugas ketika berhadapan dengan pelaku, masyarakat, dan instansi terkait.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi persuasif Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban prostitusi di Kota Gorontalo.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berusaha memahami proses komunikasi, makna, respon, serta dinamika interaksi antara petugas Satpol PP, pelaku, masyarakat, dan instansi terkait dalam konteks penertiban prostitusi. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang mendalam mengenai praktik komunikasi persuasif, bukan sekadar mengukur frekuensi atau angka kejadian.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung terhadap proses penertiban maupun interaksi komunikasi petugas. Data sekunder diperoleh dari dokumen Satpol PP Kota Gorontalo, dokumen Dinas Sosial, peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan, literatur, jurnal, dan sumber pendukung lainnya.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling digunakan untuk memilih informan yang memiliki kewenangan atau pengetahuan langsung mengenai penertiban prostitusi, sedangkan snowball sampling digunakan untuk menjangkau informan yang sensitif seperti pelaku prostitusi dan masyarakat sekitar lokasi kejadian. Informan utama terdiri atas Kepala Satpol PP Kota Gorontalo, Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban, Kepala Seksi Kemitraan, Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian, anggota Satpol PP, unsur Dinas Sosial, masyarakat sekitar, dan pelaku prostitusi dengan identitas yang dirahasiakan.

Tabel 2.
Informan Penelitian

No.	Informan	Teknik	Jumlah
1	Kepala Satpol PP Kota Gorontalo	Purposive	1 orang
2	Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban	Purposive	1 orang
3	Kepala Seksi Kemitraan	Purposive	1 orang
4	Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian	Purposive	1 orang
5	Anggota Satpol PP Kota Gorontalo	Purposive	2 orang
6	Anggota Dinas Sosial Kota Gorontalo	Purposive	1 orang
7	Pelaku prostitusi	Snowball	2 orang
8	Masyarakat sekitar	Snowball	2 orang

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan agar peneliti tetap memiliki pedoman pertanyaan, tetapi masih dapat menggali jawaban informan secara mendalam. Observasi partisipatif dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana petugas berkomunikasi dalam kegiatan penertiban. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung seperti struktur organisasi, data personel, laporan kegiatan, dan regulasi yang berkaitan dengan penertiban.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang berkaitan langsung dengan dimensi komunikasi persuasif. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif dan tabel ringkas. Kesimpulan ditarik dengan membandingkan temuan wawancara, observasi, dan dokumentasi agar diperoleh gambaran yang utuh.

Penelitian dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo dan beberapa lokasi penertiban yang relevan dengan fokus penelitian. Pelaksanaan penelitian berlangsung pada Januari 2026 dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, serta penelusuran dokumen pendukung. Lokasi tersebut dipilih karena Satpol PP Kota Gorontalo merupakan instansi yang memiliki kewenangan langsung dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis komunikasi persuasif Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban prostitusi di Kota Gorontalo menggunakan teori komunikasi persuasif DeVito. Analisis diarahkan pada tiga dimensi utama, yaitu memperkuat argumen, daya tarik psikologis, dan daya tarik kredibilitas. Selain itu, penelitian juga menguraikan faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas komunikasi persuasif di lapangan.

3.1. Gambaran Umum Lokus dan Dasar Penertiban

Kota Gorontalo merupakan ibu kota Provinsi Gorontalo sekaligus pusat pemerintahan, pelayanan publik, pendidikan, perdagangan, dan aktivitas sosial masyarakat. Karakter perkotaan tersebut membuat dinamika ketenteraman dan ketertiban umum menjadi lebih kompleks. Mobilitas masyarakat, perkembangan tempat penginapan, kegiatan ekonomi malam, serta penggunaan media komunikasi digital menjadi faktor yang membuat pemerintah daerah perlu menjaga stabilitas sosial secara berkelanjutan.

Kota Gorontalo memiliki sembilan kecamatan dan fungsi strategis sebagai kota jasa yang religius, berbudaya, dan berdaya saing. Visi tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan menjaga ruang publik agar tetap tertib dan nyaman. Ketika praktik prostitusi muncul di ruang sosial masyarakat, baik secara konvensional maupun tersembunyi, pemerintah daerah memiliki kepentingan untuk melakukan penertiban agar citra kota, kenyamanan warga, dan norma sosial tetap terjaga.

Dasar hukum utama pelaksanaan tugas Satpol PP dalam penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Trantibumlinmas, Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2022, serta Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum. Dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa penertiban prostitusi bukan tindakan personal petugas, melainkan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah.

Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 menjadi dasar penting karena memuat larangan perbuatan asusila di ruang publik dan tempat tertentu serta larangan memfasilitasi orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial. Dengan dasar hukum tersebut, Satpol PP memiliki legitimasi untuk melakukan pengawasan, pembinaan, dan penertiban. Namun legitimasi formal tetap perlu didukung legitimasi sosial melalui komunikasi yang dapat diterima masyarakat.

Satpol PP Kota Gorontalo digambarkan memiliki jumlah personel yang cukup besar, tetapi komposisi sumber daya manusia masih perlu diperhatikan dari segi kualitas komunikasi, latar belakang pendidikan, usia, dan komposisi jenis kelamin. Tugas penertiban prostitusi memerlukan kemampuan khusus karena petugas harus berhadapan dengan situasi yang sensitif, pihak yang berpotensi defensif, serta masyarakat yang memiliki persepsi beragam terhadap aparat.

Dinas Sosial Kota Gorontalo juga memiliki peran penting dalam penanganan lanjutan. Jika Satpol PP berperan pada sisi penegakan peraturan daerah dan penertiban lapangan, maka Dinas Sosial berperan pada pembinaan, rehabilitasi sosial, konseling, dan pendampingan. Kolaborasi kedua instansi ini penting agar penertiban tidak berhenti pada tindakan sesaat, tetapi diarahkan pada penyelesaian masalah sosial yang lebih berkelanjutan.

Dedy Suhendi (2021) menegaskan bahwa Satpol PP bukan sekadar aparat administratif, melainkan organisasi perangkat daerah yang memiliki kedudukan strategis dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagai instrumen utama pemeliharaan ketertiban umum. Pemahaman ini relevan ketika melihat praktik penertiban prostitusi, di mana Satpol PP harus beroperasi di batas legalitas kewenangan lembaga yang jelas. Selanjutnya dalam kajiannya yang lebih awal, Suhendi (2019) juga menyoroti fungsi Satpol PP sebagai pelindung masyarakat melalui penegakan nilai ketentraman dan perlindungan bagi warga, sebuah landasan penting dalam menilai apakah operasi penertiban yang dilakukan Satpol PP terhadap fenomena prostitusi juga mencerminkan prinsip perlindungan masyarakat.

Analisis dari Dadang Supriatna (2021) pada konteks penataan pedagang kaki lima menunjukkan kendala operasional yang sering dihadapi Satpol PP, seperti keterbatasan sumber daya dan penerapan prosedur yang belum optimal. Hal tersebut memberikan insight bahwa efektivitas penertiban tidak semata ditentukan oleh aturan, tetapi juga oleh kapasitas pelaksanaan di lapangan. Temuan lain dari penelitian Maris Gunawan Rukmana (2020) menegaskan efektivitas peran Satpol PP ditentukan oleh perencanaan, koordinasi, dan kemampuan institusi dalam menanggapi dinamika sosial di lingkungan perkotaan. Hal ini dapat dipakai untuk membandingkan bagaimana Satpol PP di Kota Gorontalo menangani isu prostitusi dibandingkan dengan penertiban masalah sosial lain seperti pedagang kaki lima.

3.2. Komunikasi Persuasif dalam Memperkuat Argumen

Dimensi memperkuat argumen merupakan aspek utama dalam komunikasi persuasif Satpol PP Kota Gorontalo. Dalam penertiban prostitusi, petugas tidak cukup hanya hadir sebagai aparat penegak aturan, tetapi harus mampu menjelaskan alasan penertiban secara kuat, masuk akal, dan dapat diterima. Penguatan argumen dilakukan melalui penyampaian data lapangan, fakta sosial, dasar hukum, serta dampak yang dapat timbul apabila praktik prostitusi terus berlangsung.

Pada indikator berbicara berdasarkan data dan fakta, Satpol PP Kota Gorontalo menyampaikan bahwa kegiatan penertiban dilakukan berdasarkan kondisi nyata yang ditemukan di lapangan. Petugas menjelaskan bahwa aktivitas prostitusi dapat berdampak terhadap ketenteraman lingkungan, memicu keresahan masyarakat, dan bertentangan dengan Peraturan

Daerah Kota Gorontalo tentang Ketertiban Umum. Penyampaian data dan fakta tersebut membuat pesan petugas lebih meyakinkan karena tidak hanya berupa perintah, tetapi didukung alasan yang dapat dipahami.

Wawancara dengan Kepala Satpol PP Kota Gorontalo menunjukkan bahwa petugas menyampaikan dampak negatif dari aktivitas yang ditertibkan serta menjelaskan konsekuensi yang dapat diterima pelaku. Hal senada disampaikan Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban bahwa informasi yang diberikan kepada pelaku dan masyarakat merujuk pada fakta lapangan, dampak sosial, serta ketentuan peraturan daerah. Temuan ini memperlihatkan bahwa komunikasi persuasif tidak dilepaskan dari landasan hukum dan fakta empiris.

Pada indikator logis dan rasional, Satpol PP Kota Gorontalo menjelaskan alasan penertiban dengan menggunakan bahasa yang dapat diterima akal. Petugas menyampaikan bahwa penertiban dilakukan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menjaga ketertiban dan mencegah dampak yang lebih luas. Penjelasan mengenai sanksi dan dasar hukum juga dilakukan agar pelaku memahami hubungan antara perbuatan, aturan, dan akibat hukum yang mungkin timbul.

Pada indikator jelas dan mudah dipahami, petugas menggunakan bahasa keseharian dan dalam beberapa situasi menyesuaikan dengan bahasa lokal Gorontalo. Penggunaan bahasa yang sederhana membuat masyarakat dan pelaku lebih mudah memahami maksud penertiban. Hal ini penting karena tidak semua sasaran komunikasi memiliki latar belakang pendidikan dan pemahaman hukum yang sama. Dengan bahasa yang mudah dipahami, risiko salah tafsir dapat ditekan.

Dengan demikian, dimensi memperkuat argumen dalam komunikasi persuasif Satpol PP Kota Gorontalo telah berjalan cukup baik. Petugas mampu menggabungkan data, fakta, dasar hukum, alasan rasional, dan bahasa sederhana untuk mendorong penerimaan pesan. Namun, penguatan argumen masih perlu dilengkapi dengan penyampaian solusi sosial agar pelaku tidak hanya memahami larangan, tetapi juga memiliki arah pembinaan setelah penertiban.

Tabel 3.
Temuan pada Dimensi Memperkuat Argumen

Indikator	Temuan Utama	Makna Temuan
Berbicara data dan fakta	Petugas menyampaikan dampak sosial, kondisi lapangan, dan dasar hukum penertiban.	Pesan menjadi lebih kuat karena tidak hanya berupa perintah, tetapi memiliki dasar faktual.
Logis dan rasional	Petugas menjelaskan alasan penertiban dan sanksi secara masuk akal.	Masyarakat dan pelaku lebih mudah memahami tujuan penertiban.
Jelas dan mudah dipahami	Petugas menggunakan bahasa keseharian dan menyesuaikan dengan bahasa lokal.	Mengurangi kesalahpahaman dan mempermudah penerimaan pesan.

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian, 2026.

3.3. Komunikasi Persuasif melalui Daya Tarik Psikologis

Daya tarik psikologis berkaitan dengan kemampuan petugas memahami kondisi batin, situasi sosial, dan norma yang hidup dalam masyarakat. Dalam penertiban prostitusi, aspek ini sangat penting karena sasaran komunikasi tidak selalu berada dalam kondisi siap menerima arahan. Sebagian pelaku merasa takut, malu, defensif, atau khawatir kehilangan sumber penghasilan. Oleh karena itu, petugas perlu memilih kata, nada bicara, dan bahasa tubuh secara hati-hati.

Pada indikator memahami situasi dan kondisi masyarakat, Satpol PP Kota Gorontalo berupaya melakukan pendekatan yang tidak langsung menghakimi. Petugas menyadari bahwa sebagian pelaku berada dalam tekanan ekonomi, sehingga komunikasi dilakukan dengan memberikan pembinaan dan arahan. Anggota Satpol PP menyampaikan bahwa mereka memperhatikan tata bahasa dan tutur kata agar masyarakat tidak menilai tindakan petugas sebagai bentuk kekasaran atau tindakan tidak profesional.

Meskipun demikian, temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang beberapa petugas terlalu keras. Salah satu informan masyarakat menyatakan bahwa ada anggota yang membuat suasana menjadi tegang, sehingga masyarakat sulit menyampaikan informasi secara terbuka. Temuan ini menunjukkan bahwa daya tarik psikologis sudah diupayakan, tetapi belum sepenuhnya konsisten pada seluruh petugas.

Pada indikator memahami norma dan etika masyarakat, Satpol PP berusaha menyesuaikan komunikasi dengan nilai lokal Gorontalo. Petugas menggunakan nada bicara yang rendah, penyampaian yang tenang, dan bahasa tubuh yang terbuka. Cara tersebut menunjukkan keseriusan dalam bertugas sekaligus membangun kesan bahwa petugas tidak hanya hadir sebagai penertib, tetapi juga sebagai aparat yang memberikan pembinaan.

Pemahaman terhadap norma dan etika sangat penting karena masyarakat Gorontalo memiliki karakter sosial yang religius dan menjunjung tinggi adat. Ketika petugas menggunakan pendekatan yang santun, masyarakat lebih mudah menerima pesan. Sebaliknya, penggunaan kata-kata yang menghakimi dapat menimbulkan rasa tersinggung dan memperkuat penolakan. Karena itu, daya tarik psikologis harus menjadi bagian dari standar komunikasi petugas.

Secara keseluruhan, dimensi daya tarik psikologis telah diterapkan melalui pendekatan humanis, pemilihan kata yang lebih santun, dan penyesuaian dengan norma lokal. Namun, penelitian menemukan perlunya penguatan pelatihan komunikasi interpersonal bagi petugas agar pendekatan yang digunakan lebih seragam dan tidak bergantung pada karakter individu petugas di lapangan.

3.4. Komunikasi Persuasif melalui Daya Tarik Kredibilitas

Daya tarik kredibilitas merupakan kemampuan petugas membangun kepercayaan sasaran komunikasi. Dalam penertiban prostitusi, kredibilitas tidak hanya ditentukan oleh seragam dan kewenangan hukum, tetapi juga oleh cara petugas berbicara, mengendalikan emosi, bersikap adil, serta menunjukkan integritas dalam setiap tindakan. Kredibilitas yang baik membuat pesan persuasif lebih mudah diterima.

Pada indikator kemampuan retorika, Satpol PP Kota Gorontalo dinilai mampu menyampaikan informasi secara rinci dan cukup mudah dipahami. Masyarakat menyatakan bahwa petugas menjelaskan maksud penertiban dengan baik dan tidak membeda-bedakan pihak yang diajak berkomunikasi. Kemampuan retorika ini penting karena penertiban sering berlangsung dalam situasi yang tidak ideal dan berpotensi menimbulkan emosi.

Kemampuan retorika juga terlihat dari upaya petugas mengendalikan nada bicara dan tetap menjaga komunikasi ketika menghadapi penolakan. Namun, juga mencatat bahwa masih terdapat kebutuhan pelatihan komunikasi persuasif, terutama karena latar belakang pendidikan personel Satpol PP cukup beragam. Hal ini menunjukkan bahwa kredibilitas lembaga perlu dibangun melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pada indikator integritas, Satpol PP Kota Gorontalo berusaha bertindak sesuai prosedur dan tidak diskriminatif. Informan masyarakat menyatakan bahwa petugas tidak bertindak sewenang-

wenang terhadap orang yang tidak terbukti melakukan pelanggaran. Pelaku juga menyampaikan bahwa petugas memberikan pembinaan dan solusi, bukan hanya melakukan penertiban. Temuan ini memperkuat bahwa integritas petugas berpengaruh terhadap penerimaan pesan persuasif.

Kredibilitas juga berkaitan dengan citra Satpol PP di mata masyarakat. Apabila masyarakat memandang Satpol PP sebagai aparat yang kasar atau hanya mengedepankan penindakan, maka pesan persuasif akan lebih sulit diterima. Sebaliknya, apabila petugas konsisten menunjukkan sikap profesional, adil, dan terbuka, maka masyarakat lebih percaya terhadap pesan dan tujuan penertiban.

Dengan demikian, dimensi daya tarik kredibilitas telah tampak dalam kemampuan retorika dan integritas petugas. Akan tetapi, kredibilitas tersebut perlu diperkuat secara kelembagaan melalui pelatihan komunikasi, penyusunan SOP komunikasi lapangan, pengawasan perilaku petugas, dan pelibatan personel perempuan dalam penanganan kasus yang berkaitan dengan pelaku perempuan.

Tabel 4.
Komunikasi Persuasif Satpol PP Kota Gorontalo

Dimensi DeVito	Indikator	Kondisi Temuan	Catatan Perbaikan
Memperkuat argumen	Data dan fakta; logis; jelas	Sudah diterapkan melalui dasar hukum, fakta lapangan, dan bahasa sederhana.	Perlu ditambah penjelasan solusi pembinaan pascapenertiban.
Daya tarik psikologis	Memahami kondisi; norma dan etika	Sudah ada pendekatan santun, tetapi belum konsisten pada semua petugas.	Perlu pelatihan komunikasi interpersonal dan pengendalian emosi.
Daya tarik kredibilitas	Retorika dan integritas	Petugas dinilai cukup adil dan mampu menjelaskan pesan.	Perlu SOP komunikasi dan peningkatan kapasitas SDM.

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian, 2026.

3.5. Faktor Penghambat Komunikasi Persuasif

Penelitian menemukan dua hambatan utama dalam pelaksanaan komunikasi persuasif Satpol PP Kota Gorontalo, yaitu hambatan psikologis dan hambatan semantis. Kedua hambatan ini memengaruhi proses penerimaan pesan dan dapat membuat komunikasi tidak berjalan sesuai tujuan.

Hambatan psikologis muncul dalam bentuk penolakan, emosi, dan stigma negatif pelaku terhadap petugas. Sebagian pelaku memandang kehadiran Satpol PP sebagai ancaman sehingga belum siap mendengar penjelasan. Bahkan, dalam beberapa situasi, petugas belum sempat menyampaikan pesan tetapi sudah mendapat respon emosional. Kondisi ini menunjukkan bahwa citra Satpol PP sangat berpengaruh terhadap efektivitas komunikasi.

Hambatan psikologis juga berkaitan dengan faktor ekonomi. Sebagian pelaku menyampaikan bahwa aktivitas tersebut dilakukan karena keterbatasan pekerjaan. Dalam situasi seperti ini, pesan larangan saja tidak cukup. Komunikasi persuasif perlu dilengkapi dengan arahan pembinaan, rujukan kepada Dinas Sosial, dan program pemberdayaan ekonomi agar pelaku memiliki alternatif yang lebih layak.

Hambatan semantis terjadi karena perbedaan pemahaman terhadap bahasa, istilah, dan makna pesan. Penggunaan istilah formal seperti "penegakan perda", "pembinaan sosial", atau "pelanggaran norma" dapat sulit dipahami oleh sebagian sasaran komunikasi. Apabila pesan tidak dipahami secara utuh, maka tujuan komunikasi persuasif tidak tercapai. Oleh karena itu, petugas perlu menggunakan bahasa yang sederhana, tidak menghakimi, dan sesuai dengan konteks sosial masyarakat.

Hambatan semantis juga dapat muncul ketika kata-kata tertentu terasa menyudutkan. Dalam konteks penertiban prostitusi, pilihan kata harus dijaga agar tidak menambah rasa malu atau defensif. Bahasa yang terlalu keras dapat membuat komunikan menutup diri. Sebaliknya, bahasa yang jelas, santun, dan mengarah pada pembinaan dapat membuka ruang dialog dan membuat pesan lebih mudah diterima.

Selain kedua hambatan tersebut, penelitian juga mencatat kurangnya pelibatan anggota Satpol PP perempuan dalam penertiban malam. Dalam beberapa kondisi, pelaku perempuan dapat merasa kurang nyaman ketika proses komunikasi atau pemeriksaan didominasi petugas laki-laki. Karena itu, pelibatan personel perempuan menjadi kebutuhan penting untuk menjaga etika pelayanan, kenyamanan sasaran komunikasi, dan efektivitas pembinaan.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa komunikasi persuasif Satpol PP membutuhkan pendekatan humanis. Sama halnya dengan penelitian Salsabila tentang penertiban warung malam, penelitian ini menunjukkan bahwa resistensi sasaran penertiban dapat berkurang apabila petugas menggunakan komunikasi yang sopan, jelas, dan berorientasi pembinaan.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Wibisono mengenai penertiban bangunan liar yang menekankan pentingnya penyampaian informasi hukum secara jelas. Dalam kasus penertiban prostitusi di Kota Gorontalo, dasar hukum dan alasan penertiban perlu disampaikan secara sederhana agar pelaku dan masyarakat memahami bahwa tindakan Satpol PP bukan bentuk kesewenang-wenangan, melainkan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah.

Berbeda dengan penelitian tentang pedagang kaki lima yang lebih banyak berkaitan dengan aspek ekonomi dan ruang publik, penelitian ini menunjukkan bahwa penertiban prostitusi memiliki sensitivitas sosial yang lebih tinggi. Sasaran penertiban tidak hanya menghadapi konsekuensi hukum, tetapi juga stigma sosial dan tekanan psikologis. Karena itu, komunikasi persuasif dalam penelitian ini harus lebih menekankan empati, pilihan kata yang tidak menghakimi, dan rujukan pembinaan sosial.

Temuan penelitian ini memperluas kajian komunikasi persuasif Satpol PP dengan menunjukkan bahwa kredibilitas petugas menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Kredibilitas tidak hanya dibentuk oleh kewenangan formal, tetapi juga oleh kemampuan retorika, pengendalian emosi, keadilan, dan integritas. Ketika petugas mampu menunjukkan sikap profesional, pesan persuasif lebih mudah diterima oleh pelaku maupun masyarakat.

Temuan menarik lainnya adalah perlunya sinergi antara Satpol PP dan Dinas Sosial. Penertiban prostitusi tidak cukup berhenti pada operasi dan pembinaan di tempat, tetapi perlu dilanjutkan dengan rehabilitasi sosial, konseling, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, komunikasi persuasif menjadi pintu masuk menuju perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan.

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian menemukan bahwa struktur sumber daya manusia Satpol PP Kota Gorontalo didominasi oleh personel laki-laki. Sementara itu, penertiban prostitusi sering kali berhadapan dengan pelaku perempuan. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan pelibatan personel perempuan secara lebih aktif agar proses komunikasi, pendampingan, dan pembinaan dapat berlangsung lebih nyaman dan etis.

Penelitian juga menemukan bahwa sebagian personel memiliki latar belakang pendidikan yang beragam. Keberagaman ini tidak menjadi masalah apabila didukung pelatihan yang memadai, tetapi dapat berpengaruh terhadap kemampuan retorika dan sensitivitas komunikasi di lapangan. Oleh karena itu, pelatihan komunikasi persuasif perlu menjadi agenda rutin kelembagaan, bukan hanya kemampuan personal yang dibiarkan tumbuh secara alami.

Temuan lain adalah pentingnya penggunaan bahasa lokal secara proporsional. Bahasa Gorontalo dapat memperdekat jarak emosional antara petugas dan masyarakat. Namun, penggunaan bahasa lokal harus tetap disertai dengan penjelasan yang jelas dan tidak merendahkan. Bahasa lokal yang digunakan secara tepat dapat memperkuat kepercayaan dan mempercepat pemahaman pesan.

3.8. Model Penguatan Komunikasi Persuasif Satpol PP

Berdasarkan hasil penelitian, model penguatan komunikasi persuasif Satpol PP Kota Gorontalo dapat dibangun melalui empat tahap, yaitu persiapan pesan, pelaksanaan komunikasi, tindak lanjut pembinaan, dan evaluasi kelembagaan. Tahap persiapan pesan dilakukan sebelum operasi penertiban melalui penyusunan informasi yang akan disampaikan kepada pelaku dan masyarakat. Informasi tersebut perlu memuat dasar hukum, tujuan penertiban, dampak sosial, serta alternatif pembinaan yang tersedia.

Tahap pelaksanaan komunikasi dilakukan saat operasi berlangsung. Pada tahap ini, petugas perlu membagi peran dengan jelas, misalnya siapa yang memimpin komunikasi, siapa yang melakukan pengamanan, siapa yang mendampingi pelaku perempuan, dan siapa yang menjelaskan prosedur administrasi. Pembagian peran penting agar komunikasi tidak tumpang tindih dan tidak menimbulkan kesan intimidatif. Petugas yang memiliki kemampuan retorika lebih baik sebaiknya ditempatkan sebagai komunikator utama.

Tahap tindak lanjut pembinaan dilakukan setelah penertiban. Komunikasi persuasif tidak boleh berhenti setelah pelaku dibawa atau diberikan teguran. Satpol PP perlu memastikan adanya rujukan kepada Dinas Sosial, pendataan kebutuhan pelaku, serta penjelasan mengenai program pembinaan yang dapat diakses. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya bersifat melarang, tetapi juga memberi jalan keluar yang realistis.

Tahap evaluasi kelembagaan dilakukan untuk menilai apakah komunikasi yang digunakan sudah efektif. Evaluasi dapat dilakukan melalui rapat internal, catatan lapangan, masukan masyarakat, dan koordinasi lintas sektor. Hasil evaluasi perlu digunakan untuk memperbaiki SOP,

materi sosialisasi, dan pola pendekatan petugas pada operasi berikutnya. Evaluasi ini penting karena dinamika prostitusi dapat berubah mengikuti pola sosial dan teknologi masyarakat.

Model penguatan ini menempatkan komunikasi persuasif sebagai bagian dari manajemen penertiban. Artinya, komunikasi bukan hanya keterampilan tambahan, tetapi menjadi unsur utama yang menentukan keberhasilan penertiban. Semakin baik kualitas komunikasi, semakin besar peluang terciptanya kepatuhan, kerja sama masyarakat, dan penurunan konflik di lapangan.

Tabel 5.
Model Penguatan Komunikasi Persuasif Satpol PP Kota Gorontalo

Tahap	Kegiatan Utama	Output yang Diharapkan
Persiapan pesan	Menyusun dasar hukum, fakta lapangan, tujuan penertiban, dan opsi pembinaan.	Pesan lebih jelas, seragam, dan mudah disampaikan petugas.
Pelaksanaan komunikasi	Menentukan komunikator utama, menjaga nada bicara, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami.	Interaksi lebih kondusif dan risiko konflik menurun.
Tindak lanjut pembinaan	Merujuk pelaku kepada Dinas Sosial dan menjelaskan program pembinaan.	Penertiban tidak berhenti pada tindakan sesaat.
Evaluasi kelembagaan	Mengevaluasi kendala komunikasi dan respon masyarakat setelah operasi.	SOP dan kapasitas petugas semakin baik.

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

3.9. Implikasi Praktis bagi Pemerintah Daerah

Implikasi praktis pertama adalah perlunya penguatan kapasitas komunikasi petugas Satpol PP. Pelatihan tidak hanya berisi pemahaman regulasi, tetapi juga teknik komunikasi interpersonal, negosiasi dasar, pengendalian emosi, pemilihan diksi, dan komunikasi dalam situasi berisiko. Pelatihan ini penting karena petugas di lapangan merupakan wajah langsung pemerintah daerah di hadapan masyarakat.

Implikasi kedua adalah perlunya SOP komunikasi dalam penertiban prostitusi. SOP tersebut dapat memuat tahapan penyampaian pesan, larangan penggunaan kata-kata yang merendahkan, prosedur pendampingan pelaku perempuan, mekanisme koordinasi dengan Dinas Sosial, dan tata cara dokumentasi kegiatan. Dengan SOP yang jelas, komunikasi persuasif tidak hanya bergantung pada karakter individu petugas.

Implikasi ketiga adalah pentingnya pendekatan lintas sektor. Penertiban prostitusi berkaitan dengan faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, dan penggunaan teknologi. Oleh karena itu, Satpol PP perlu berkoordinasi dengan Dinas Sosial, aparat kepolisian, tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat kelurahan, dan pengelola penginapan. Koordinasi tersebut memperkuat pencegahan, pengawasan, dan pembinaan pascapenertiban.

Implikasi keempat adalah perlunya memperbaiki citra Satpol PP di masyarakat. Citra positif tidak dapat dibangun hanya melalui publikasi, tetapi melalui konsistensi perilaku petugas di lapangan. Ketika masyarakat melihat petugas bersikap adil, sopan, dan profesional, kepercayaan publik akan meningkat. Kepercayaan tersebut menjadi modal penting bagi keberhasilan komunikasi persuasif.

Implikasi kelima adalah perlunya menyediakan alternatif pembinaan bagi pelaku. Banyak pelaku memiliki alasan ekonomi dan keterbatasan pekerjaan. Karena itu, pemerintah daerah perlu

menghubungkan penertiban dengan pelatihan keterampilan, pendampingan sosial, dan akses program pemberdayaan. Tanpa alternatif yang jelas, komunikasi persuasif berisiko hanya menghasilkan kepatuhan sementara.

3.10. Implikasi Teoretis terhadap Kajian Komunikasi Pemerintahan

Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi persuasif dalam pemerintahan daerah memiliki karakter yang berbeda dengan komunikasi persuasif dalam bidang bisnis, pendidikan, atau dakwah. Dalam pemerintahan daerah, komunikasi persuasif selalu berhubungan dengan kewenangan, regulasi, dan kepentingan publik. Oleh karena itu, komunikasi persuasif aparatur harus menjaga keseimbangan antara ketegasan hukum dan pendekatan humanis.

Teori DeVito membantu menjelaskan bahwa keberhasilan persuasi tidak hanya ditentukan oleh isi pesan, tetapi juga oleh daya tarik psikologis dan kredibilitas komunikator. Dalam kasus Satpol PP, pesan hukum yang benar dapat gagal diterima apabila disampaikan dengan bahasa yang sulit dipahami atau oleh petugas yang tidak dipercaya. Sebaliknya, pesan yang sederhana, santun, dan disampaikan oleh petugas yang kredibel lebih mudah diterima.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa hambatan komunikasi dalam penertiban bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah relasi sosial. Stigma terhadap Satpol PP, rasa takut pelaku, dan perbedaan makna bahasa dapat menghambat proses persuasi. Dengan demikian, komunikasi pemerintahan perlu lebih memperhatikan dimensi psikologis, budaya, dan pengalaman masyarakat dalam menerima pesan pemerintah.

Penelitian ini memperkaya kajian komunikasi pemerintahan dengan menunjukkan bahwa penertiban sebagai fungsi pemerintahan tidak selalu harus dipahami sebagai tindakan represif. Penertiban dapat dikembangkan sebagai proses komunikasi sosial yang mengedukasi, membina, dan membangun kesadaran hukum. Perspektif ini penting untuk mendorong tata kelola ketertiban umum yang lebih demokratis, humanis, dan efektif.

3.11. Rekomendasi Operasional

Pertama, Satpol PP Kota Gorontalo perlu menyusun naskah pesan standar yang dapat digunakan dalam penertiban prostitusi. Naskah tersebut bukan untuk membuat komunikasi menjadi kaku, tetapi untuk memastikan setiap petugas menyampaikan pesan utama yang sama, yaitu dasar hukum, tujuan penertiban, hak dan kewajiban pihak yang ditertibkan, serta jalur pembinaan yang tersedia. Dengan pesan yang seragam, potensi kesalahan informasi dapat dikurangi.

Kedua, setiap operasi penertiban perlu melibatkan petugas yang memiliki kompetensi komunikasi dan minimal satu petugas perempuan ketika sasaran penertiban melibatkan perempuan. Pelibatan ini penting untuk menjaga kenyamanan, etika pelayanan, dan kepercayaan pihak yang ditertibkan. Selain itu, petugas perempuan dapat berperan dalam pendampingan awal sebelum proses rujukan ke Dinas Sosial.

Ketiga, Satpol PP perlu memperkuat komunikasi pencegahan melalui perangkat kelurahan, RT/RW, tokoh agama, dan pengelola penginapan. Komunikasi pencegahan dapat dilakukan melalui sosialisasi aturan, imbauan tertulis, dan kanal pelaporan warga. Upaya ini membuat penertiban tidak hanya bersifat reaktif setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga preventif melalui pengawasan sosial masyarakat.

Keempat, hasil penertiban perlu didokumentasikan dalam bentuk laporan evaluasi komunikasi, bukan hanya laporan jumlah pelanggaran. Laporan tersebut dapat memuat respon masyarakat, jenis hambatan, kata atau pendekatan yang kurang efektif, serta rekomendasi

perbaikan. Dengan cara ini, Satpol PP memiliki basis pembelajaran kelembagaan untuk meningkatkan kualitas penertiban berikutnya.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa komunikasi persuasif Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban prostitusi di Kota Gorontalo telah berjalan cukup baik melalui penerapan dimensi memperkuat argumen, daya tarik psikologis, dan daya tarik kredibilitas. Pada dimensi memperkuat argumen, petugas menyampaikan data, fakta lapangan, dasar hukum, alasan yang logis, serta bahasa yang mudah dipahami. Pada dimensi daya tarik psikologis, petugas berupaya memahami situasi masyarakat, menggunakan nada bicara yang santun, dan memperhatikan norma lokal. Pada dimensi daya tarik kredibilitas, petugas menunjukkan kemampuan retorika, pengendalian emosi, integritas, dan perlakuan yang tidak diskriminatif.

Faktor penghambat komunikasi persuasif terdiri atas hambatan psikologis dan hambatan semantis. Hambatan psikologis muncul dari penolakan pelaku, emosi, rasa takut, tekanan ekonomi, serta citra negatif terhadap Satpol PP. Hambatan semantis muncul dari perbedaan pemahaman bahasa, penggunaan istilah formal, dan pilihan kata yang berpotensi menyinggung sasaran komunikasi. Selain itu, kurangnya pelibatan personel perempuan dalam penertiban malam menjadi catatan penting bagi perbaikan pelaksanaan tugas.

Berdasarkan temuan tersebut, Satpol PP Kota Gorontalo disarankan meningkatkan pelatihan komunikasi persuasif, memperkuat SOP komunikasi lapangan, melibatkan personel perempuan dalam penertiban yang sensitif, serta memperkuat koordinasi dengan Dinas Sosial dan unsur masyarakat. Pemerintah daerah juga perlu mendukung program pemberdayaan ekonomi dan pembinaan sosial agar penertiban tidak hanya menghasilkan kepatuhan sesaat, tetapi juga mendorong perubahan perilaku secara berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup lokasi yang berfokus pada Kota Gorontalo dan jumlah informan yang terbatas. Selain itu, topik prostitusi merupakan isu sensitif sehingga sebagian informasi lapangan sulit digali secara terbuka. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu dibaca sebagai gambaran mendalam pada konteks tertentu, bukan sebagai generalisasi untuk semua daerah.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penelitian lanjutan dapat mengkaji komunikasi persuasif Satpol PP dalam penertiban penyakit masyarakat dengan pendekatan yang lebih luas, misalnya melalui perspektif korban, keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun analisis kebijakan rehabilitasi sosial. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan metode campuran untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap citra Satpol PP dan efektivitas komunikasi persuasif secara lebih kuantitatif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo, Dinas Sosial Kota Gorontalo, masyarakat, informan penelitian, pembimbing, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, data, dan informasi sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Cahya, P. (2022). *Strategi komunikasi persuasif Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Semarang* [Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. Repository IPDN. https://eprints.ipdn.ac.id/9063/

Chaiken, S. (1980). Heuristic versus systematic information processing and the use of source versus message cues in persuasion. Journal of Personality and Social Psychology, 39(5), 752-766. https://doi.org/10.1037/0022-3514.39.5.752

Cialdini, R. B., & Goldstein, N. J. (2004). Social influence: Compliance and conformity. Annual Review of Psychology, 55, 591-621. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.55.090902.142015

Decker, M. R., Crago, A. L., Chu, S. K. H., Sherman, S. G., Seshu, M. S., Buthelezi, K., Dhaliwal, M., & Beyrer, C. (2015). Human rights violations against sex workers: Burden and effect on HIV. The Lancet, 385(9963), 186-199. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60800-X

Dadang Supriatna. (2021). *Penataan pedagang kaki lima oleh Satpol PP dalam upaya menjaga ketertiban lalu lintas pada Pasar Tanjungsari*. Jurnal Tata Pamong, 10(2), 66–81. https://ejournal.ipdn.ac.id/index.php/jurnaltatapamong/article/view/1513

Dedy Suhendi. (2019). *Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelindung masyarakat*. Jurnal Pemerintahan Daerah, 7(1), 33–49. https://ejournal.ipdn.ac.id/JPKP/article/view/716

Dedy Suhendi. (2021). *Satuan Polisi Pamong Praja sebagai organisasi perangkat daerah yang menjaga wibawa pemerintah dengan menegakkan peraturan daerah*. Jurnal Tata Pamong, 10(1), 12–28. https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/view/1588

Dillard, J. P., & Shen, L. (2005). On the nature of reactance and its role in persuasive health communication. Communication Monographs, 72(2), 144-168. https://doi.org/10.1080/03637750500111815

Eviany, E., & Sutiyo. (2023). *Perlindungan masyarakat: Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan manajemen kebencanaan* (Cet. 1). Nas Media Indonesia. https://perpustakaan.kemendagri.go.id/opac/index.php?id=9771&keywords=&p=cite

Jackson, J., Bradford, B., Hough, M., Myhill, A., Quinton, P., & Tyler, T. R. (2012). Why do people comply with the law? Legitimacy and the influence of legal institutions. British Journal of Criminology, 52(6), 1051-1071. https://doi.org/10.1093/bjc/azr086

Labolo, M. (2008). *Memahami ilmu pemerintahan*. RajaGrafindo Persada. https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=6845

Maris Gunawan Rukmana. (2020). *Efektivitas peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Bandung*. Jurnal Tata Pamong, 9(2), 78–92. https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/view/1234

Mazerolle, L., Bennett, S., Davis, J., Sargeant, E., & Manning, M. (2013). Procedural justice and police legitimacy: A systematic review of the research evidence. Campbell Systematic Reviews, 9(1), 1-147. https://doi.org/10.4073/csr.2013.1

Murphy, K., Tyler, T. R., & Curtis, A. (2009). Nurturing regulatory compliance: Is procedural justice effective when people question the legitimacy of the law? Regulation & Governance, 3(1), 1-26. https://doi.org/10.1111/j.1748-5991.2009.01043.x

O'Keefe, D. J. (2013). The relative persuasiveness of gain-framed and loss-framed messages for encouraging disease prevention behaviors: A meta-analytic review. Annals of the International Communication Association, 36(1), 1-43. https://doi.org/10.1080/23808985.2013.11679128

Petty, R. E., & Cacioppo, J. T. (1986). The elaboration likelihood model of persuasion. Advances in Experimental Social Psychology, 19, 123-205. https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60214-2

Platt, L., Grenfell, P., Meiksin, R., Elmes, J., Sherman, S. G., Sanders, T., Mwangi, P., & Crago, A. L. (2018). Associations between sex work laws and sex workers' health: A systematic review and meta-analysis of quantitative and qualitative studies. PLOS Medicine, 15(12), e1002680. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002680

Rekart, M. L. (2005). Sex-work harm reduction. The Lancet, 366(9503), 2123-2134. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(05)67732-X

Salsabila, F. (2025). *Komunikasi persuasif Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban warung malam di Kabupaten Hulu Sungai Tengah* [Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. Repository IPDN. https://eprints.ipdn.ac.id/21289/

Saputra, R. (2024). *Komunikasi persuasif Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan* [Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. Repository IPDN. https://eprints.ipdn.ac.id/16533/

Shannon, K., Strathdee, S. A., Goldenberg, S. M., Duff, P., Mwangi, P., Rusakova, M., Reza-Paul, S., Lau, J., Deering, K., Pickles, M. R., & Boily, M. C. (2015). Global epidemiology of HIV among female sex workers: Influence of structural determinants. The Lancet, 385(9962), 55-71. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60931-4

Sunshine, J., & Tyler, T. R. (2003). The role of procedural justice and legitimacy in shaping public support for policing. Law & Society Review, 37(3), 513-548. https://doi.org/10.1111/1540-5893.3702002

Tyler, T. R. (2006). Psychological perspectives on legitimacy and legitimation. Annual Review of Psychology, 57, 375-400. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.57.102904.190038

Weitzer, R. (2009). Sociology of sex work. Annual Review of Sociology, 35, 213-234. https://doi.org/10.1146/annurev-soc-070308-120025